

## KEKERASAN MASSAL MENGANCAM PROSES DEMOKRATISASI

Oleh : Ir. Soetomo, SA

*Kekerasan massal sebagai fenomena sosial tampak tidak mudah dibendung dengan rambu undang-undang atau peraturan. Gejalanya mencuat setelah era kebebasan dan keterbukaan ini bergulir. Sebagian besar rakyat merasa tidak ada lagi yang akan menghalangi untuk berbuat apa saja, karena mereka yang mencoba menghalangi akan dianggap anti reformasi dan sekaligus harus dihancurkan. Gelora massa ini kian menakutkan. Ada beberapa kepala desa yang terpilih tidak berani menerima jabatan itu dan bahkan langsung menyerahkan kepada orang lain atau "care-taker", karena takut di demo oleh massa. Beberapa pakar hukum dan tim advokasi tidak berani melanjutkan tugas- untuk membela "clientnya" karena kantornya dirusak dan diancam akan dibunuh. Sebuah perusahaan membiarkan saja pabriknya tutup serta pimpinan dan stafnya menghilang karena buruhnya berunjuk rasa, merusak, membakar fasilitas pabrik hingga lumpuh total. Demikian sekilas gambaran kekerasan massal yang terjadi.*

### EMOSIONAL LEBIH DOMINAN DARI PADA RASIONAL

**P**erjalanan reformasi menuju masyarakat madani di wacana Indonesia baru kiranya masih cukup jauh untuk dicapai. Sementara itu ketidak sabaran masyarakat yang menuntut keadaan, persamaan dan pemerataan disegala sisi kehidupan semakin marak di mana-mana. Ketidak sabaran itu muncul karena dorongan sikap emosional dan faktor pemicu yang meluas dari situasi politik yang makin kusut, bercorak multi dimensional. Rakyat yang menuntut hak-haknya pada saat ini, harus dapat dipenuhi hari ini juga. Sudah tidak akomodatif lagi terhadap janji ataupun

himbauan pemerintah. Kehendak untuk membinasakan atau menghakimi lawan serta fasilitas milik kelompok yang dianggap "lawan" telah mengabaikan penalaran manusia sehat, dan melecehkan hukum dan peraturan. Terasa tidak ada gunanya orang berbicara tentang hukum yang berlaku. Karena harapan terakhir dari suatu proses peradilan tidak mampu lagi memberikan nurani keadilan yang memuaskan Kata-kata "setimpal" kadang-kala dimanipulasi oleh silat lidah para pakar hukum di dalam mahkamah pengadilan tersebut, sehingga hukuman yang diberikan tidak setimpal dan tidak memiliki efek kejeraan.

Orang cenderung ingin mengadili sendiri secara

beramai-ramai. Bahkan kini mulai merebak dan populer dengan istilah "peradilan rakyat" dengan instruksi para "pemuka rakyat" di lapangan. Di dalam teori ilmu jiwa, memang semua tindakan yang emosional acap kali tidak menggunakan rasio tetapi lebih menonjolkan sikap-sikap kebencian dan kebrutalan. Itulah sikap sebagian besar masyarakat kita sekarang ini. Berbicara fakta dari berbagai kerusuhan, demonstrasi dan gejolak sosial yang terjadi di masyarakat kini, sulit dicari motivasi yang sebenarnya. Apalagi untuk mencari siapa provokatornya. Polisi dan bahkan aparat penyidik beserta LSM pun tidak berhasil mengungkap pelaku tersebut. Akumulasi ketidak puasan karena berbagai tekanan sosial,

menjadi bahaya yang kini ter- selubung di masyarakat. Orang pasti sulit mencari akar masalah pada tiap peristiwa. Tidak mungkin diusut dan dari sumber yang mana pemicunya karena sifatnya yang multi dimensi dari berbagai aspek dan kemudian terakumulasi pada masyarakat yang majemuk.

Sebagai contoh aktual penyerangan oleh sekelompok orang yang membumi hanguskan komplek STT Doulos di Cipayung, Jakarta Timur, disana telah terjadi aksi kekerasan masal yang relatif "rapi" cn brutal. Benarkah akar masalahnya itu dari aspek agama dengan misal kebencian umat Islam terhadap kegiatan warga Kristen yang ada di sana. Secara sepintas mungkin. Tetapi pernahkah kita menduga bahwa gerakan itu adalah bagian dari suatu skenario politik, untuk memancing peristiwa yang lebih besar hingga kekacauan di Ibukota RI seperti peristiwa 12 Mei 1998 yang lalu terjadi lagi. Barangkali yang lebih naif adalah banyaknya orang yang mencari nafkah melalui lahan ini, yakni "perusuh bayaran", yang sudah terbukti di beberapa tempat.

Dizaman modern "pembunuh bayaran" dan "perusuh bayaran" bukanlah sesuatu yang langka, karena didesak oleh keadaan ekonomi yang sulit. Manakala ada peluang untuk memperoleh upah dari suatu kegiatan, apakah itu mengandung resiko badan atau akan beresiko nyawa, rakyat miskin tidak akan menolak sehingga siapapun yang merasa menerima bayaran

wajib memaanuhi aktifitas itu, tidak perlu tahu siapa pemberi uang itu. Demikian sulitnya kita mengungkap provokator atau siapapun yang ada dibalik layar peristiwa itu.

### TIDAK ADANYA KEPASTIAN

Mengapa aksi kekerasan masal itu terjadi ? Tidak lain akibat dari tekanan jiwa dan rasa tidak puas karena banyak korban kebathilan yang tidak memperoleh kepastian hukum, kepastian perbaikan ekonomi, politik, kesejahteraan sosial dan lain-lain. Bila diurutkan faktor penyebab secara umum dari mulai krisis moneter hingga memburuknya perekonomian nasional telah membuat kita semua bangsa Indonesia tidak mempunyai harapan-harapan nyata ke depan. Semuanya serba tidak pasti seperti kapan berakhirnya fluktuasi rupiah terhadap dollar AS, itupun semua pakar ekonomi tak mampu menjawab. Sebagian diantara mereka pernah memprediksi hingga awal tahun 2000 rupiah akan mengambang diantara angka Rp 6000,- hingga Rp 7000,- tetapi nyatanya melampaui angka tertinggi tersebut. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang terkadang langka dan mencapai harga yang sangat tinggi dn terkadang membanjir hingga harganya anjlog dan petani mengeluh rugi. Bersamaan dengan krisis ekonomi tersebut kondisi berat berikutnya adalah krisis kepercayaan. Krisis inilah yang berdampak sangat luas. Hilangnya kepercayaan kepada pemimpin nasional, pemimpin

umat, aparat pemerintah dan aparat keamanan yang sehari-hari berhadapan dengan rakyat, semakin memicu tindakan main hakim sendiri. Mereka memandang bahwa semua yang berbau pemerintah, TNI/ Polri adalah rekayasa dan muaranya akan merugikan rakyat, karena itu harus dilawan. Hukum dan peraturan hanya sebagai simbol, tidak lagi memiliki makna, legitimasi dan im-plementasi.

Kepercayaan rakyat kepada pemimpin memang sangat tergantung pada "kehandalan" pemimpin tersebut. Pemimpin itu tidak cukup hanya berdasarkan legitimasi terpilih dengan suara terbanyak oleh masa rakyatnya, tetapi ia harus memiliki kearifan, kecerdasan dan keberanian menghadapi resiko, dengan dilandasi oleh sikap mental yang tangguh. Keberaniannya untuk mengambil keputusan d dalam menghadapi keadaan kritis dengan segala resiko adalah sikap pemimpin yang patut dipuji. Jangan banyal bersandar, apalagi banyal bertanya kepada staf dan lingkungan dekatnya. Bila hal itu terjadi maka pemimpin seperti itu tidak akan menjacob dewasa apalagi berwibawa

Di dalam masyarakat yang serba tidak memperoleh kepastian untuk berbagai tuntutan keadilan maka giliran berikutnya adalah terjadi krisis moral. Kondisi terakhir ini yang sekarang terjadi bahwa masyarakat terutama generasi muda kita sebagian besar sedang terlenda budaya ne liberalisme dan kebebasan tanpa batas sebagai wuju



*Dampak kerusuhan  
senantiasa  
merugikan masyarakat  
(Foto: Istimewa).*

ketidakpuasan dalam bentuk lain dan juga degradasi moral yang memprihatinkan. Di sisi lain penggunaan obat-obatan terlarang dan psykhotropika merajalela dan sulit diberantas. Bahwa krisis moral paling berbahaya bagi suatu bangsa, karena hal itu sangat berdampak luas. Eksesnya bukan hanya saat ini, tetapi 10-20 tahun mendatang. Bilamana generasi muda kita telah rusak moralnya, maka untuk memulihkan akan memakan waktu yang relatif lama.

Akumulasi semua ketidakpastian itu kini mencuatlah dengan ide sepa-ratisme oleh beberapa propinsi yang tampaknya sudah hampir memaksa pemerintah pusat, karena kesal dan tidak puas atas janji-janji selama ini. Bilamana pemerintah pusat tidak serius dan hanya memberi ultimatum: "tidak ada negara dalam negara" tanpa diimbangi dengan langkah nyata untuk memenuhi janji dan mem-

berikan otonomi seluas-luasnya, maka reaksi yang terselubung dan yang kongkrit di permukaan akan semakin mengkristal dengan konsep memunculkan pemberontakan di mana-mana. Bila keadaan itu yang terjadi maka TNI dan Polri tidak akan mampu membendung aksi tersebut. Di sanalah proses disintegrasi bangsa akan terjadi. Tidak ada lagi peredam emosi dan perekat persatuan yang dapat diandalkan untuk mengatasi.

#### **AKSI KEKERASAN MASSAL SEBAGAI MODEL**

Untuk menghancurkan wibawa aparat birokrasi adalah dengan kekerasan massal. Begitu pula untuk menjamin berhasilnya suatu tuntutan, cenderung akan menggunakan aksi serupa. Seolah-olah telah ditemukan doktrin baru dalam kancah demokrasi itu yakni "gerakan massal untuk menghancurkan sesuatu dan tidak mungkin dapat dituntut di

pengadilan".

Konon di AS pada abad-19 pernah tercatat pula adanya suatu aksi anarkhi yang dilakukan secara massal disebut "Vigilante" yakni semacam aparat penegak hukum partikelir, dengan cara berkelompok mereka membasmi kejahatan, kemaksiatan dan juga terhadap siapapun yang dianggap berperilaku tidak adil. Kelompok vigilante itu sulit untuk diadili karena gerakannya cepat dan jumlahnya relatif besar. Kelompok-kelompok itu selalu menakuti rakyat. (Tempo Edisi 17 - 23 Januari 2000).

Bilamana anggota kelompok itu diadili dengan menghadirkan sejumlah terdakwa, maka untuk membebaskan para terpidana nantinya juga dengan kekerasan massal, bila perlu membakar tempat tahanan di kepolisian atau membakar penjara yang bersangkutan. Jika kasus berlanjut akan membesar pula proses peradilan untuk mengadili sejumlah besar terdakwa baru.

Model kekerasan masal yang sekarang kita hadapi termasuk yang sangat sulit untuk diselesaikan mengingat masalahnya yang amat kompleks. Kini banyak masyarakat bertanya: Inikah warna demokrasi yang ingin kita wujudkan. Seharusnya Demokrasi dapat menjamin kebebasan, rakyat diayomi oleh keadilan, sehingga sinergi dari perbedaan itu dapat menuju ke arah yang konstruktif. Kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dapat dirasakan oleh semuanya. Berapa lama kira-kira keadaan itu terwujud?

Di AS saja lebih dari 70 tahun setelah merdeka untuk menciptakan masyarakat demokrasi yang sesungguhnya.

Masa transisi ini dapat pula disebut masa eksperimen yakni percobaan perubahan dari masyarakat yang serba terpimpin (otoritarian) kepada masyarakat yang bebas dan berdemokrasi yang sehat. Bila arah perubahan itu menyimpang maka dapat menjurus kepada anarkhisme dan kanibalisme hingga terjadi "Homo Homini Lupus" maka yang kuat akan melibas yang lemah dan akhirnya lahirlah rezim yang dholim, dipimpin oleh pemimpin yang sangat otoriter.

Dari beberapa pengamat belum juga diperoleh data, seberapa banyak masyarakat kita yang tergolong masuk di dalam kategori kelompok keras tersebut. Sampai sekarang belum ada survey yang mendata, sehingga tidak jelas berapa prosentase dari suatu komunitas yang berambisi selalu

ingin melakukan tindak kekerasan. Apakah memang sudah hilang naluri kemanusiaannya?. Ada beberapa media yang pernah menulis bahwa mereka yang potensial menjadi aktor dan terlibat dalam gerakan masa yang cenderung mudah menjadi brutal antara lain: kaum muda yang masih menjadi pengangguran, orang-orang tua atau tokoh lama yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang, mereka yang kecewa dan frustrasi terhadap keadaan ekonomi saat ini, mereka yang tidak memperoleh kursi jabatan dan sudah biasa hidup dihormati serta mereka yang menginginkan tidak ada perubahan karena akan membahayakan aset-asetnya.

#### SIAPA DI BALIK BERBAGAI PERISTIWA ?

Sejak era reformasi bergulir hingga saat ini terlalu banyak orang yang tidak puas baik karena posisinya tersingkir dari arena politik dan tidak mendapatkan dukungan lagi, maupun orang-orang yang memiliki cita-cita politik ingin menguasai negara ini dengan landasan ideologi yang lain. Secara internal dan termasuk dalam kategori ketidakpuasan yang endemis (laten) paling tidak ada 3 kelompok kepentingan.

**Pertama adalah** orang-orang yang masih ingin mempertahankan status quo mendambakan keadaan otoritarianisme dan kekuasaan terpusat (sentralistik) tetap langgeng agar tetap tercipta

stabilitas nasional yang "aman terkendali" dan perlahan-lahan menerima paham demokrasi, secara gradual memenuhi tuntutan masyarakat. Mereka ini masih yakin bahwa pendekatan keamanan harus tetap ketat, sambil mengatasi gejolak ekonomi dan krisis moneter yang belum kunjung stabil, maka tindakan-tindakan keras untuk menghambat kebebasan dipandang masih perlu dipertahankan. Kelompok ini terlalu yakin bahwa tanpa stabilitas nasional yang dinamis, tidak mungkin terjadi pembangunan sosial ekonomi, politik dan budaya. Sekarang kelompok ini "bertepuk tangan" dan memandang sinis kepada pemerintahan Gus Dur, karena arus reformasi sudah dianggap kebablasan, tak terbatas hingga sukar memadamkan unjuk rasa maupun kerusuhan yang destruktif. Mereka ini sangat yakin bahwa tanpa tindakan preventif maupun represif untuk preventif dengan kekuatan riil yang disiagakan penuh di seluruh wilayah mustahil mampu mempertahankan ketenangan bangsa ini. Ciri-ciri lama yang masih melekat dan terbaca hingga sekarang adalah akar-akar KKN yang masih sangat kuat, dan sukar diberantas. Ada pengamat sosial yang menilai bahwa korupsi dan kolusi itu ibaratnya sudah "mendarat daging" menjadi bagian dari budaya bangsa kita, telah mengakar kuat di masyarakat. Apabila ingin membasmi semua itu harus menunggu paling tidak satu generasi ( $\pm 25$  tahun) dengan usaha serius (intensif) mulai saat iri dengan meng-



*Dampak kerusuhan  
senantiasa  
merugikan masyarakat  
(Foto: istimewa).*

ketidak puasan dalam bentuk lain dan juga degradasi moral yang memprihatinkan. Di sisi lain penggunaan obat-obatan terlarang dan psykhotropika merajalela dan sulit diberantas. Bahwa krisis moral paling berbahaya bagi suatu bangsa, karena hal itu sangat berdampak luas. Eksesnya bukan hanya saat ini, tetapi 10-20 tahun men-datang. Bilamana generasi muda kita telah rusak moralnya, maka untuk me-mulihkan akan me-makan waktu yang relatif lama.

Akumulasi semua ketidak pastian itu kini mencuatlah dengan ide sepa-ratisme oleh bebe-rapa propinsi yang tampaknya sudah hampir memaksa pemerintah pusat, karena kesal dan tidak puas atas janji-janji selama ini. Bilamana pemerintah pusat tidak serius dan hanya memberi ultimatum: "tidak ada negara dalam negara" tanpa diimbangi dengan langkah nyata untuk memenuhi janji dan mem-

berikan otonomi seluas-luasnya, maka reaksi yang terselubung dan yang kongkrit di permukaan akan semakin mengkristal dengan konsep memunculkan pemberontakan di mana-mana. Bila keadaan itu yang terjadi maka TNI dan Polri tidak akan mampu mem-bendung aksi tersebut. Di sanalah proses disintegrasi bangsa akan terjadi. Tidak ada lagi peredam emosi dan perekat persatuan yang dapat diandalkan untuk mengatasi.

#### **AKSI KEKERASAN MASSAL SEBAGAI MODEL**

Untuk menghancurkan wibawa aparat birokrasi adalah dengan kekerasan massal. Begitu pula untuk menjamin berhasilnya suatu tuntutan, cenderung akan menggunakan aksi serupa. Seolah-olah telah ditemukan doktrin baru dalam kancah demokrasi itu yakni "gerakan massal untuk menghancurkan sesuatu dan tidak mungkin dapat dituntut di

pengadilan".

Konon di AS pada abad-19 pernah tercatat pula adanya suatu aksi anarkhi yang dilakukan secara masal disebut "Vigilante" yakni semacam aparat penegak hukum partikelir, dengan cara berkelompok meerka membasmi kejahatan, kemaksiatan dan juga terhadap siapapun yang dianggap berperilaku tidak adil. Kelompok vigilante itu sulit untuk diadili karena gerakannya cepat dan jumlahnya relatif besar. Kelompok-kelompok itu selalu menakuti rakyat. (Tempo Edisi 17 - 23 Januari 2000).

Bilamana anggota kelompok itu diadili dengan menghadirkan sejumlah terdakwa, maka untuk membebaskan para terpidana nantinya juga dengan kekerasan masal, bila perlu membakar tempat tahanan di kepolisian atau membakar penjara yang bersangkutan. Jika kasus berlanjut akan membesar pula proses peradilan untuk mengadili sejumlah besar terdakwa baru.

Model kekerasan masal yang sekarang kita hadapi termasuk yang sangat sulit untuk diselesaikan mengingat masalahnya yang amat kompleks. Kini banyak masyarakat bertanya: Inikah warna demokrasi yang ingin kita wujudkan. Seharusnya Demokrasi dapat menjamin kebebasan, rakyat diayomi oleh keadilan, sehingga sinergi dari perbedaan itu dapat menuju ke arah yang konstruktif. Kesejahteraan dan kedamaian masyarakat dapat dirasakan oleh semuanya. Berapa lama kira-kira keadaan itu terwujud?

Di AS saja lebih dari 70 tahun setelah merdeka untuk menciptakan masyarakat demokrasi yang sesungguhnya.

Masa transisi ini dapat pula disebut masa eksperimen yakni percobaan perubahan dari masyarakat yang serba terpimpin (otoritarian) kepada masyarakat yang bebas dan berdemokrasi yang sehat. Bila arah perubahan itu menyimpang maka dapat menjurus kepada anarkhisme dan kanibalisme hingga terjadi "Homo Homini Lupus" maka yang kuat akan melibas yang lemah dan akhirnya lahirlah rezim yang dholim, dipimpin oleh pemimpin yang sangat otoriter.

Dari beberapa pengamat belum juga diperoleh data, seberapa banyak masyarakat kita yang tergolong masuk di dalam kategori kelompok keras tersebut. Sampai sekarang belum ada survey yang mendata, sehingga tidak jelas berapa prosentase dari suatu komunitas yang berambisi selalu

ingin melakukan tindak kekerasan. Apakah memang sudah hilang naluri kemanusiaannya?. Ada beberapa media yang pernah menulis bahwa mereka yang potensial menjadi aktor dan terlibat dalam gerakan masa yang cenderung mudah menjadi brutal antara lain: kaum muda yang masih menjadi pengangguran, orang-orang tua atau tokoh lama yang tidak puas dengan pemerintahan sekarang, mereka yang kecewa dan frustrasi terhadap keadaan ekonomi saat ini, mereka yang tidak memperoleh kursi jabatan dan sudah biasa hidup dihormati serta mereka yang menginginkan tidak ada perubahan karena akan membahayakan aset-asetnya.

#### SIAPA DI BALIK BERBAGAI PERISTIWA ?

Sejak era reformasi bergulir hingga saat ini terlalu banyak orang yang tidak puas baik karena posisinya tersingkir dari arena politik dan tidak mendapatkan dukungan lagi, maupun orang-orang yang memiliki cita-cita politik ingin menguasai negara ini dengan landasan ideologi yang lain. Secara internal dan termasuk dalam kategori ketidakpuasan yang endemis (laten) paling tidak ada 3 kelompok kepentingan.

**Pertama adalah** orang-orang yang masih ingin mempertahankan status quo mendambakan keadaan otoritarianisme dan kekuasaan terpusat (sentralistik) tetap langgeng agar tetap tercipta

stabilitas nasional yang "aman terkendali" dan perlahan-lahan menerima paham demokrasi, secara gradual memenuhi tuntutan masyarakat. Mereka ini masih yakin bahwa pendekatan keamanan harus tetap ketat, sambil mengatasi gejolak ekonomi dan krisis moneter yang belum kunjung stabil, maka tindakan-tindakan keras untuk menghambat kebebasan dipandang masih perlu dipertahankan. Kelompok ini terlalu yakin bahwa tanpa stabilitas nasional yang dinamis, tidak mungkin terjadi pembangunan sosial ekonomi, politik dan budaya. Sekarang kelompok ini "bertepuk tangan" dan memandang sinis kepada pemerintahan Gus Dur, karena arus reformasi sudah dianggap kebablasan, tak terbatas, hingga sukar memadamkan unjuk rasa maupun kerusuhan yang destruktif. Mereka ini sangat yakin bahwa tanpa tindakan preventif maupun represif untuk preventif dengan kekuatan riil yang disiagakan penuh di seluruh wilayah, mustahil mampu mempertahankan ketenangan bangsa ini. Ciri-ciri lama yang masih melekat dan terbaca hingga sekarang adalah akar-akar KKN yang masih sangat kuat, dan sukar diberantas. Ada pengamat sosial yang menilai bahwa korupsi dan kolusi itu ibaratnya sudah "mendarat daging" menjadi bagian dari budaya bangsa kita, telah mengakar kuat di masyarakat. Apabila ingin membasmi semua itu harus menunggu paling tidak satu generasi ( $\pm 25$  tahun) dengan usaha serius (intensif) mulai saat iri dengan meng-

ganti orang-orang atau aparat yang bermental buruk, dengan kader-kader bangsa yang potensial. Agar tercipta suasana yang kondusif maka pada saat yang simultan perlu membenahan sistem manajemen ketata negaraan maupun manajemen masyarakat yang lebih transparan. Kelompok pertama ini tidak akan menyerah begitu saja, menghadapi perkembangan dan kecaman dari kelompok pembaharu, karena asset mereka telah begitu luas di tengah masyarakat baik yang berupa fisik- materiil, maupun pendukung. Untuk mempertahankan pandangan dan keyakinannya, tidak segan mereka upayakan apa saja, termasuk mengorbankan aset kemanusiaan. Dari kelompok ini pula diduga mereka mempunyai andil dan merencanakan untuk menimbulkan kerusuhan di mana-mana, agar pemerintah gagal dan tak mampu mengatasi dan akhirnya terjadi "chaos" dan muncul "kekuatan penyelamat" baru.

**Kedua, adalah** kelompok yang menginginkan cepat merobah situasi negara dari alam otoritarianisme kepada alam demokrasi sepenuhnya. Kekuasaan di tangan rakyat dan kedaulatan rakyat harus terwujud hingga tercapai supremasi sipil atas militer. Kelompok ini dikenal sebagai kaum reformis yang sangat radikal. Perubahan cepat yang didorong terus kini telah terjadi dan proses demokrasi telah berjalan di hampir semua kelembagaan. Pendobrakan budaya KKN telah berkali-kali

menghadapi tantangan dari unsur-unsur kelompok pertama, diberbagai lembaga. Kemenangan pragmatis secara aktual telah berada di tangan kaum reformis, tetapi euforia reformasi itu kini menjadi kebablasan. Kebebasan media masa untuk menampilkan berbagai pendapat, sensasi dan unjuk rasa tampak mulai marak memicu dan mengarah kepada kecenderungan saling curiga, saling menghujat dan saling memojokkan. Fihak-fihak yang merasa dirugikan dan dipojokkan tentu saja akan menyimpan dendam yang secara akumulatif menunggu kesempatan membalas, baik dengan tanggapan balik, maupun dengan kekerasan. Kalaupun kekerasan massal kini marak dimana-mana sebagai ekspresi ketidakpuasan kelompok maupun masyarakat yang lebih luas, adalah proses sebab dan akibat. Kelompok yang merasa terpojok dan dirugikan nama baiknya bisa saja membayar orang-orang tertentu untuk menghancurkan kelompok lain sebagai rival atau "musuh".

Kebablasan berikutnya adalah meluasnya pandangan negatif masyarakat tentang penegakan hukum dan keadilan. Krisis kepercayaan kepada aparat pemerintah termasuk aparat penegak hukum dan keadilan, yang selama ini dianggap tidak mampu mengayomi rakyat kecil dan terjadi kolusi antara lembaga peradilan dengan kekuasaan, menghasilkan rendahnya kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap penegakan hukum.

Beberapa kasus kekerasan masal yang secara frontal melawan hukum dan terang-terangan tidak menghargai peranan aparat penegak hukum, adalah satu bukti bahwa vandalisme dan anarkhisme sedang terjadi. Bila mana keadaan ini tidak segera diatasi maka kasus yang lebih besar akan meledak juga. Apa akibat dari semua kasus tersebut? Yang jelas rakyat merasa resah, gelisah dan takut. Bahkan aparat TNI/Polri pun menjadi ragu-ragu menindak dengan tegas, karena aparat akan dihadapkan kepada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan. Dihadapi dengan kekerasan akan timbul korban rakyat dalam jumlah besar, yang bisa dituduh sebagai "genocide" dan melanggar HAM. Tetapi bila tidak dihadapi dengan kekerasan maka korban pertama adalah sejumlah aparat itu sendiri dan berikutnya adalah rakyat tak berdosa serta hancurnya hasil-hasil fisik pembangunan. Dampak negatif berikutnya adalah kekerasan masal itu secara psikologis seperti memperoleh pembenaran, dan semakin mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak puas kepada pemerintah, sedangkan pada sisi lain moral aparat akan merosot jatuh dan sulit diangkat kembali. Kelompok reformis total ini sekarang menghadapi dilema. Tujuan ingin melahirkan demokrasi melalui Pemilu dan Sidang Umum MPR yang lalu, ternyata tidak menghasilkan suasana yang stabil dan kondusif.

Gejolak politik dan ekonomi terjadi terus menerus, stabilitas keamanan sebagai prasyarat untuk menciptakan masyarakat - madani di alam Indonesia baru sukar diwujudkan. Sementara dukungan politik untuk melahirkari supremasi sipil atas militer, mendorong timbulnya saling kecurigaan tentang *fihak mana* akan menyingkirkan *fihak mana*. Sementara pengamat yang moderat menginginkan TNI/Polri agar menuntut kesetaraan dan bukan faham supremasi yang berlebihan, yang penting adalah harmonisasi dan sinergi dari keduanya untuk membangun masyarakat madani ters. Ada pendapat di masyarakat justru istilah supremasi sipil itu bermakna, militer di kuasai oleh sipil dan akan muncul suatu sikap berlebihan dari sipil untuk membelenggu militer. Bila wacana itu berkembang menjadi salah faham, maka tidak akan lahir masyarakat madani. Sejalan dengan paradigma barunya TNI/Polri akan lebih sadar, dan dapat menerima perubahan zaman sesuai dengan kodratnya. Tampilnya komponen kekuatan bangsa di luar TNI/Polri sebagai hasil pembangunan selama ini telah diterima dengan lapang dada dan muncul sikap TNI/Polri untuk "Tut Wuri Handayani", tetapi tentu tidak bisa dinafikan tentang kepedulian TNI/Polri terhadap pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai alat negara TNI/Polri adalah penyanggah dan penangkal awal ancaman terhadap negara dan bangsa tetapi sebagai warga negara In-

donesia tentu tidak patut berdiam diri dan berpangku tangan melihat masalah-masalah kebangsaan yang terjadi. Mungkin bentuk peran itu yang perlu dirumuskan tersendiri dan tidak berpotensi sebagai wajah baru dari "sospol ABRI".

**Ketiga, adalah** kelompok yang ingin menguasai negara ini melalui suatu revolusi dan sekaligus mengganti ideologi, kelompok ini selalu tidak puas dengan pemerintah siapapun. Mereka akan terus beroposisi dan bahkan berkonfrontasi. Cita-citanya harus tercapai melalui satu revolusi sosial dan merombak semua tatanan yang telah ada, untuk digantikan dengan tatanan baru yang disebut sebagai masyarakat sosialis-demokratik.

Aktivitas kelompok tersebut adalah terus menerus dengan sistimatis menciptakan kontradiksi, paradoksa, antagonistik dan pertentangan antar kelompok. Di front tertentu buruh dan majikan terus digoyang dengan, protes, unjuk rasa dan kekerasan masal melawan "kedholiman (istilah mereka). Membuat kotak-kotak organisasi di masyarakat, mahasiswa, kaum miskin kota, buruh, nelayan, petani dll, untuk diarahkan agar berhadapan satu sama lain. Mereka saat ini sedang memilih dan meng- . gembeng kader-kader yang patriotik, kritis, potensial dan radikal terdiri dari elemen generasi muda, mahasiswa dan anak-anak dari orang yang tidak puas atau sakit hati terhadap pemerintah. Dari kader-kader inilah, mereka disusupkan ke tengah-tengah kelompok yang

sedang berhadapan atau sedang dendam. Bila pertentangan antar kelompok itu diarahkan kepada masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) kemudian meluas dan menjadi besar maka akan dapat memicu revolusi sosial. Mereka memilih cara dengan kekerasan yang bersifat masal karena dengan metoda ini akan relatif aman menghasilkan korban yang besar dan sulit dilacak dari sisi hukum.

Bila semua kondisi itu disebabkan oleh faktor internal bangsa Indonesia saat ini juga menghadapi intervensi asing dari kelompok-kelompok masyarakat internasional yang tidak ingin melihat Indonesia aman dan stabil. Goncangan hebat melalui tuduhan pelanggaran HAM telah kita rasakan, anggapan mereka Indonesia adalah negara "terburuk" memperlakukar HAM, sehingga dengan strateg "memperalat" LSM dan kelompok-kelompok ant pemerintah, mereka membua berbagai tuntutan HAM yang terjadi dimasa lalu maupun yang kini terjadi. Secara yuridis dan universal tuntutan itu dia kui kebenarannya. Tetapi dibalil "movement" tuntutan itu tidal menutup kemungkinan ter selubung kepentingan politi dari negara tertentu, yang ingil mengail ikan di air yang keruh Negara Eropa, Amerika Serika Portugal, Belanda, Finlandi serta beberapa negara di A rika, dll. adalah tempat ber lindungnya kelompok-kelompo tersebut melakukan aksi-aksi sepihak yang cenderung menyudutkan Indonesia dimat dunia dalam hal penangana



*Demo mahasiswa di era reformasi (Dok.BB)*

HAM. Kasus aktual yang kini dirasakan oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana kelompok-kelompok tersebut ingin melemahkan TNI/Polri. Komponen kekuatan bangsa yang dulu bernama ABRI ini dianggap sebagai biang keladi tindak kekerasan dan sebagai pilar kokoh yang membentengi Indonesia terhadap suatu ideologi tertentu.

Tindak kekerasan masa lalu kini sedang mereka inventarisir kembali, untuk dijadikan referensi dan pokok-pokok tuntutan secara sistematis. Saat ini sedang gencar KPP HAM memasalahkan kekerasan di Tim Tim pasca jajak pendapat. Berikutnya mungkin semua kasus pasca 1975 di Tim Tim, kemudian kasus Aceh, Kalbar, Ambon, Maluku dan seterusnya. Bisa diramalkan apabila intervensi asing itu terus dilancarkan didukung dengan sistem pendanaan yang cukup, serta disambut oleh berbagai LSM lama maupun LSM baru yang

bermotifkan perjuangan HAM, maka kiranya tidak berlebihan bahwa bangsa Indonesia tidak akan sempat berfikir ke depan, dan justru terus "diobok-obok" dan dialihkan perhatiannya untuk berkutat mengkorek-korek "luka yang lama" sudah barang tentu akibatnya adalah kekisruhan di dalam negeri tidak ada habis-habisnya. Sementara itu negara-negara berkembang dan negara maju lainnya telah menyusun strategi dan siap melangkah menghadapi era perdagangan bebas dan liberalisasi di berbagai aspek kehidupan. Bila diamati dengan seksama makin terlihat upaya menjatuhkan TNI/Polri adalah sasaran pertama untuk masuknya faham baru dan ideologi politik yang mereka anggap paling tepat bagi Indonesia. Sasaran kedua adalah golongan agama, para tokoh ulama, pemimpin gereja, para pemimpin umat terutama penganut Islam. Karena dengan persatuan Islam maka Indonesia sulit diobrak-abrik atau digo-

yahkan. Semua upaya itu akan diwujudkan dalam bentuk gerakan massal yang tidak mengenal waktu dan tempat. Dimana ada benih perpecahan di masyarakat, serta diperkirakan akan dapat berdampak luas, maka kesempatan itu akan dimanfaatkan oleh kelompok radikal tersebut.

### **LSM SEBAGAI SIMPUL PENGGERAK**

Jika tidak ada LSM maka tidak mungkin terjadi gerakan mas-al. LSM baik yang bermotifkan politik, sosial maupun yang bersifat partisan dan mencari bayaran adalah simpul awal untuk kegiatan pengumpulan massa. Mereka ada yang digerakan dengan motivasi tuntutan secara damai, tetapi tidak sedikit yang dipacu untuk mencapai hasil dari tuntutan secara kekerasan. Bila tidak terpenuhi tuntutan tersebut, mereka melakukan aksi kekerasan dengan merusak, membakar dan menjarah.

Sekalipun tampaknya suatu peristiwa itu berasal dari kelompok rakyat yang bergerak secara murni, tanpa ditunggangi oleh provokator, namun bila diteliti akan terbukti dibalik itu ada intervensi dari LSM tertentu, dengan cara-cara yang sangat halus. LSM yang bersemangat untuk gerakan tersebut, pada umumnya yang memiliki kepentingan sosial atau dengan bayaran tertentu. Keyakinan mereka bahwa di tengah masyarakat lapis mana-pun ada benih konflik atau paling tidak terdapat persaingan-persaingan di tengah masyarakat yang heterogen. Di dalam suasana krisis seperti ini sangat banyak benih konflik bisa tumbuh, terutama karena faktor kemiskinan, yakni miskin pangan, sandang, papan dan miskin moral dan kesabaran. Dari sebab itulah amat subur LSM dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih populer. Namun tidak semua LSM berkonotasi negatif banyak pula yang benar-benar menyuarakan hati nurani di dalam membela hak azazi manusia. Kelompok LSM yang terakhir inilah sebenarnya yang diharapkan tumbuh di alam demokrasi, yang akan berperan sebagai pelaksana fungsi kontrol.

### **BAGAIMANA SEHARUSNYA PROSES DEMOKRASI DI-TUMBUHKEMBANGKAN**

#### **WAHANA PENDIDIKAN**

Melalui pendidikan politik yang berencana dan terarah adalah jalan terbaik untuk mencapai sasaran masyarakat yang

demokratis. Tidak mungkin kita mengharapkan terwujudnya suatu tatanan masyarakat madani yang demokratis, tanpa melalui suatu proses pendidikan dan pengajaran yang demokratis pula. Sejak dini dari generasi ke generasi baru yang berkesinambungan, harus sudah tertanam ajaran nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, kesetaraan, perbedaan pendapat, partisipasi aktif, dll, terhadap berbagai permasalahan hidup. Dari suatu keluarga sederhana pun sudah harus terinternalisasi nilai-nilai demokrasi. Sifat dan sikap otoriter orang tua terhadap anak-anaknya harus dikikis dan digantikan dengan sifat dan sikap keterbukaan, kejujuran, kebebasan mengutarakan pendapat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga tersebut. Begitu pula di lingkungan sekolah, organisasi kemasyarakatan dan institusi apapun, disosialisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut, dengan sistematis dan terarah, agar supaya kehidupan disemua lapisan masyarakat, tercipta suasana yang benar-benar demokratis.

Ada 3 (tiga) kendala yang masih terasa sekarang dan mungkin sulit dipecahkan, yakni **pertama** masih bercokolnya tokoh-tokoh dan para elite politik dilapisan atas yang masih berusaha mendistorsi demokrasi agar tidak segera lahir masyarakat yang demokratis.

**Kedua** adalah tatanan birokrasi yang 90% lebih masih diduduki oleh orang-orang lama yang enggan melepaskan budaya "kultus" dan loyalitas yang berlebihan kepada pemimpin

sehingga nilai-nilai demokrasi sukar diterapkan dan cenderung mempertahankan keadaan itu agar tidak berubah. **Faktor ketiga** adalah kondisi masyarakat Indonesia yang cenderung berbudaya paternalistik dan selalu patuh pada petunjuk atasan dan relatif sukar mengatakan "tidak" apalagi menolak dan tidak setuju, walaupun mereka rasakan keputusan itu tidak adil. Ketiga kendala di atas di era reformasi ini sekarang sedang dikikis dan menjadi agenda sasaran perubahan. Bila ketiga sasaran itu tak mampu diatasi maka akan sukar mengimplementasikan demokrasi di Indonesia.

### **SETIAP PROSES PEMILIHAN UNGGULAN HARUS BER-AZASKAN DEMOKRASI**

Apakah untuk Pemilu, pemilihan pemimpin nasional dan daerah, pemimpin partai, orpol, ormas dan kelembagaan di manapun harus diterapkan azas demokrasi. Azas musyawarah untuk mencapai mufakat boleh saja diterapkan, tetapi harus dapat memberikan kepuasan kepada komunitas tersebut dan keabsyahan bagi setiap calon yang terpilih, tidak ada lagi rekayasa dan proses "money politics" yang mencemarkan. Itulah tanda-tanda berhasilnya sebagian dari pendidikan politik tersebut. Voting sebagai salah satu cara dan mungkin pula sebagai metode terakhir untuk memperoleh legitimasi absolut dari suatu proses pemilihan di dalam suatu komunitas, tidak ditabukan dan bahkan harus

disadari oleh semua pihak bahwa "voting" adalah cara terbaik dan outhentik untuk suatu upaya memilih mana calon yang terbaik.

Bilamana semua proses pemilihan pemimpin atau wakil-wakil rakyat itu dapat dilaksanakan dengan "luber jurdil" serta didasari oleh semangat persaudaraan yang tinggi, niscaya bangsa ini akan tetap utuh dan bersatu di dalam satu wadah yang namanya alam demokrasi. Bagi mereka yang kebetulan belum terpilih harus bisa bersifat "legowo" dan rela memberikan hak itu kepada yang terpilih dan bersedia mendukung atau menjadi faktor oposisi yang sehat.

### **STABILITAS NASIONAL TERJAMIN**

Satu persyaratan yang amat penting untuk dapat tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang mapan adalah stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dapat kita wujudkan secara berkesinambungan. Mustahil cita-cita demokrasi bisa terlaksana bilamana stabilitas keamanan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya tidak terkendali. Dengan kata lain kekacauan timbul dimana-mana, situasi politik tidak menentu, harga-harga kebutuhan pokok rakyat tidak stabil serta media masa memuat berbagai isu dan berita sensasi yang mengkhawatirkan. Masa transisi saat ini (*transition period*) diperkirakan akan berjalan 2-3 tahun atau bahkan lebih, tergantung dari dinamika dan ak-selerasi pemerintahan baru

sekarang. Menuju alam demokrasi baik struktural maupun kultural tidak bisa dipaksakan, karena ibarat tubuh yang sakit dengan berbagai penyakit tentu perlu terapi dan penyembuhan akurat dan bertahap, bila tidak justru akan lebih fatal akibatnya. Kewaspadaan nasional terhadap berbagai ancaman dis-integrasi bangsa, serta timbulnya kekacauan di berbagai daerah, harus ditanggulangi bersama. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pada kekuatan TNI/Polri, yang sudah kita ketahui mengandung berbagai keterbatasan baik kuantita maupun kualita. TNI/Polri lebih diarahkan kepada penindak dan penyanggah awal terhadap peristiwa kerusuhan dll, sedangkan untuk selanjutnya aalah semua aparat pemerintahan yang terkait di dukung oleh kekuatan-kekuatan rakyat yang telah terorganisir untuk secara bersama-sama dan terkoordinir melaksanakan penjagaan dan pemeliharaan ketentraman masyarakat. Berikutnya adalah peranan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat memberikan siraman rohani, penerangan serta pertolongan yang bersifat kejiwaan untuk mencairkan kebuntuan komunikasi, agar ketentraman dan perdamaian yang terwujud sementara bisa berlanjut hingga tercipta ketenangan yang relatif abadi.

Dambaan tentang ketentraman abadi seperti masa-masa lalu, dengan disertai perasaan aman dimana-mana, mungkin saat ini relatif langka dan justru kecemasan dan ke-

takutan yang sering timbul dihati masyarakat. Karena itu semua fihak dan seluruh masyarakat harus segera merubah sikap dari sifat-sifat apriori, arogansi dan saling curiga, ke arah saling memahami dan bersabar menerima cobaan, serta bertekad mempertahankan persatuan.

### **KEWIBAWAAN PEMIMPIN**

Seorang pemimpin bangsa dapat dinilai kewibawaannya dari berbagai sudut. Ada kalanya dari sisi kemampuan penguasaan terhadap berbagai masalah nasional, dengan cara pemecahannya yang akurat, efektif dan sangat arif segala keputusannya mencerminkan keadilan sosial yang menyeluruh. Ada pula yang dilihat dari cara-cara memilih strategi pembangunan bangsanya yang sangat "wasis" (cermat-tajam) dan menunjukkan kepiawaian, termasuk memilih pembantu-pembantunya yang tepat untuk menangani penyelesaian sasaran demi sasaran agar dapat mencapai tujuan. Kewibawaan pemimpin nasional adalah syarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Jangan harap pembangunan dapat berjalan bilamana sang pemimpin tidak berwibawa. Begitu pula pembangunan demokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani. Harus terpilih dulu pemimpin yang "legitimatien, berwibawa serta cerdas. Kewibawaan bulan "ke-angkeran" atau sesuatu yang dibuat-buat untuk menakuti unsur-unsur yang dipimpin. Mungkin ada pemimpin yang

Mungkin ada pemimpin yang ingin disebut pelopor demokrasi karena ia sangat merakyat, merendah dan mampu mengakomodasi semua aspirasi. Tetapi karena luasnya cakupan sikap akomodatif tersebut, berimplikasi kepada sulitnya memilih pembantu mana yang paling cocok. Jika tidak memiliki program kerja yang jelas, dan tak mampu memilih staf dan pembantu serta pelaksana yang tepat, maka kesulitan demi kesulitan akan dihadapi. Akumulasi

permasalahan itu sendiri akhirnya semakin merongrong kewibawaan sang pemimpin. Mengapa faktor kewibawaan pemimpin ini perlu diangkat disini dalam proses mendemokraskan rakyat? Karena sudah banyak kita amati, pada dewasa ini dari lapis bawah hingga tingkat atas boleh kita catat bahwa tidak banyak pemimpin organisasi dan kelembagaan yang disebut berwibawa. Banyak kita jumpai sang pemimpin tak mampu menyusun program kerja, tidak

realistis dalam mengatut pelaksanaan dan akhirnya cenderung untuk meninggalkan tanggung jawab, inilah kondisi yang memprihatinkan. Harapan masyarakat madani adalah adanya kehidupan yang tata tenteram, adil makmur diliputi alam demokrasi, dengan pemimpin yang adil bijaksana dan berwibawa, sehingga menjadi idola rakyatnya dan bangga terhadap pemimpinnya. Kapankah itu? "Wallahu 'Alam Bishshawab"

Ir. Soetomo, S.A., Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Agama





# JASA MARGA

BUMN Penyelenggara jalan tol

Menuju Visi Perusahaan  
Menjadi Penyelenggara Jalan Tol yang unggul dan  
terpercaya dalam kerangka Pembangunan Nasional

## Jalan tol yang dikelola Jasa Marga

1.	Jagorawi	46 km
2.	Jakarta - Cikampek	72 km
3.	Cawang - Tomang - Pluit	24,96 km
4.	Prof. Dr. Ir. Sedyatmo	14,30 km
5.	Jakarta - Tangerang	27 km
6.	Surabaya - Gempol	42 km
7.	Padalarang - Cileunyi	46,58 km
8.	Belawan - Medan - Tanjung Morawa	34,40 km
9.	Semarang	24,30 km
10.	Plumbon - Kanci (Cirebon)	20,30 km
11.	Jembatan tol Mojokerto	1,25 km
12.	Jembatan tol Citarum	0,91 km
	Total	354 km

### KANTOR PUSAT :

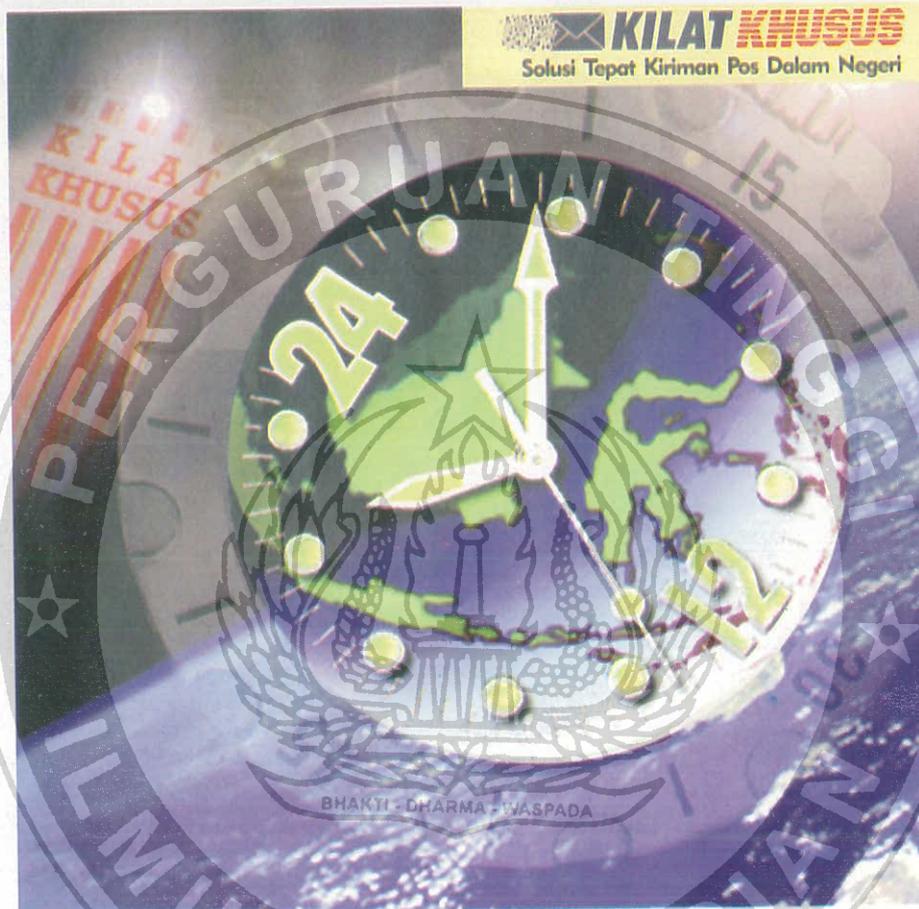
Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13550

Alamat Surat : Kotak Pos 4354, Jakarta 12043

Telp. (021) 841 3526, 841 3630 Fax. (021) 840 1533, 841 3540

e-mail : jasmarg@cbn.net.id

<http://www.tollroad-jasamarga.com>



Jika WAKTU dan KECEPATAN sangat penting bagi Anda

Bagi Anda yang membutuhkan kecepatan dan jaringan yang luas di seluruh Indonesia maka Layanan Kilat Khusus merupakan solusi yang tepat karena kiriman Anda dijamin akan tiba di tujuan dalam waktu 1 atau 2 x 24 jam\* dan jaringan kami tersebar lebih dari 220 kota di Indonesia. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut dapat Anda hubungi telepon 1-6-1 HALO POS-161

\* 1x24 jam untuk kota-kota yang terhubung oleh angkutan udara langsung.  
2x24 jam untuk kota-kota yang tidak terhubung oleh angkutan udara secara langsung

